

BAB V

KESIMPULAN

Seiring dengan beroperasinya berbagai perusahaan tambang minyak Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, Amerika Serikat memulai melakukan kegiatan intervensinya yang dikemas dalam bentuk politik luar negeri. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Amerika Serikat dalam membuat kebijakan luar negerinya di kawasan tersebut, seperti kebutuhan akan minyak, peristiwa 9/11, dan kepentingan Israel. Pada penghujung tahun 2010 hingga 2011, Timur Tengah mengalami pergolakan politik yang disebut sebagai “*Arab Spring*”. Terdapat empat hal yang menjadi fokus Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah Pasca *Arab Spring*. Keempat faktor tersebut, yaitu keamanan nasional Amerika Serikat dan warga negara Amerika Serikat, stabilitas regional, promosi terhadap efektivitas dan legitimasi pemerintahan, hak asasi manusia, penegakkan hukum, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, serta kebebasan untuk melakukan hubungan dagang, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara di dalam lingkup regional. Untuk menjaga kepentingannya Timur Tengah, Amerika Serikat sering bersikap Standar Ganda. Salah satu negara Timur Tengah yang memiliki potensi besar, yaitu Mesir. Mesir merupakan wilayah penting untuk tujuan strategis Amerika Serikat. Hal tersebut disebabkan oleh posisi Mesir berada pada garis lintang yang menjadi lalu lintas minyak dunia. Selain itu, wilayah Mesir juga berbatasan dengan Israel dan Gaza menjadikan Mesir sebagai aktor penting, strategis, dan politis dalam perdamaian Israel dengan Palestina.

Sebelah barat wilayah Mesir juga berbatasan dengan Libya dan Sudan di selatan, kedua negara yang mampu mempengaruhi keamanan wilayah tersebut.

Hubungan antara Amerika Serikat mengalami pasang-surut. Pada masa Abdel Nasser, hubungan Amerika Serikat dengan Mesir penuh dengan gejolak. Nasser menolak bekerjasama dengan Amerika Serikat dengan menunjukkan sikap lebih pro-Soviet. Hubungan Amerika Serikat dengan Mesir pada rezim Hosni Mubarak telah berkembang menuju pada persahabatan bilateral yang independen di luar proses perdamaian Timur Tengah. Hosni Mubarak melanjutkan kedekatan kedua negara dari presiden Mesir sebelumnya, yaitu Anwar Sadat yang melahirkan perjanjian Camp David. Pada peristiwa penggulingan Morsi, Amerika mendukung proses kudeta tersebut karena Morsi dianggap mampu menghambat kepentingan Amerika Serikat di Mesir. Padahal Amerika Serikat juga memberikan dukungannya pada masa awal kemenangan Morsi yang dipilih melalui proses demokrasi. Kudeta militer tersebut tidak terlepas dari kedekatan militer Mesir dengan Amerika Serikat. Selain memberikan bantuan dana dan perdagangan senjata untuk militer Mesir, hubungan tersebut menghasilkan beberapa generasi perwira militer Mesir yang mengenyam pendidikan dan doktrin militer Amerika Serikat. Kedekatan Amerika Serikat dengan militer Mesir sudah terjadi sejak masa presiden Nasser.

Amerika Serikat memiliki kepentingan-kepentingan yang cukup banyak di Mesir, baik ekonomi dan politik. Kemenangan Mohamed Morsi dari kelompok Ikhwanul Muslimin dalam pemerintahan Mesir menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Amerika Serikat dan sekutunya, terutama Israel. Hal tersebut terkait dengan

phobia terhadap Islam (*Islamophobia*) yang masih menghantui Amerika Serikat. Mereka menganggap kelompok Islam dapat mengancam kepentingan-kepentingan Amerika Serikat baik di Timur Tengah, khususnya di Mesir. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Amerika Serikat memberikan dukungan terhadap penggulingan Morsi dengan tidak menyebutnya suatu tindakan kudeta dan tetap memberikan bantuan dana tahunannya ke Mesir. Amerika Serikat memiliki peranan yang sangat besar dalam penggulingan presiden Morsi tersebut, mulai dari pendanaan terhadap oposisi-oposisi Morsi, hingga penggunaan LSM-LSM Amerika Serikat dalam mempengaruhi masyarakat Mesir. Amerika Serikat lebih baik mengambil sikap untuk berstandar ganda daripada kepentingan dan hegemoninya terancam.